



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 170/13 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa Pembahasan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 Oktober 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

BAGUS SELO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR,



Mulyono
MULYONO
NIP. 19640818 199111 1002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 170/ 13 TAHUN 2022
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 TAHUN 2023

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

| NO | TENTANG | MATERI POKOK | STATUS | | PELAKSANAAN | DISERTAI | | UNIT/INSTANSI TERKAIT/PEMRAKARSA | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|----|---|---|--------|------|-------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---|
| | | | BARU | UBAH | | NASKAH AKADEMIK | PENJELASAN/KETERANGAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | <ul style="list-style-type: none"> - Status Lingkungan Hidup - Profil Daerah - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah - Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung | Baru | | 2023 | NA | | Dinas Lingkungan Hidup | Oktober | - Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------------------------|--|------|---|------|----|---|-----------------------|-----|---|
| | | | | | | | | | | 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja |
| 2. | PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | <ul style="list-style-type: none"> - Jenis Pajak - Jenis dan Obyek Retribusi - Tata Cara Perhitungan Retribusi - Pemungutan Pajak dan Retribusi - Pengaturan Pajak dan Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan | Baru | | 2023 | NA | | Badan Keuangan Daerah | Mei | - Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|---|------|------|------|----|------------|---|-----|---|
| | | Berusaha dan Berinvestasi - Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi | | | | | | | | |
| 3. | INVESTASI PEMERINTAH | Penyertaan Modal Uang - Penyertaan Modal Aset - Penyertaan Modal Dalam Bentuk Lainnya Tata Cara Penyertaan Modal | Baru | | 2023 | NA | | 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 2. Badan Keuangan Daerah | Mei | Dasar Hukum Bagi Pemerintah Daerah dalam Penyertaan Modal Kepada BUMD |
| 4. | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGANYAR | Perubahan Modal Dasar | | Ubah | 2023 | | Penjelasan | 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum | Mei | Dasar Hukum bagi Pemerintah Daerah dalam Perubahan Modal Dasar |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|------------------------------------|---|------|---|------|----|---|---|-----|---|
| 5. | BELA BELI PRODUK KARANGANYAR | - Pengembangan Perekonomian Daerah - Meningkatkan peran usaha mikro/kecil dan pengembangan industri kreatif unggulan daerah | Baru | | 2023 | NA | | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Mei | - Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| 6. | DESA WISATA | - Pengembangan Desa Wisata - Peningkatan Potensi Daerah, Unggulan Desa dan Pendapatan Daerah | Baru | | 2023 | NA | | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Mei | - Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata-an - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|--|------|---|------|----|---|---|-----|---|
| 7. | PENYERTAAN MODAL BAGI PUD ANEKA USAHA | Sarana Prasarana Edupark dan Tanah | Baru | | 2023 | NA | | 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3. Badan Keuangan Daerah 4. Inspektorat Daerah | Mei | Tindak Lanjut LHP BPK |
| 8. | PENYELENGGA-RAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA | Perizinan Berusaha Kewenangan Pemerintah Daerah Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Pembinaan dan Pengawasan | Baru | | 2023 | NA | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Mei | Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggara-an Perizinan Berusaha di Daerah |

DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR KUMULATIF TERBUKA

| NO | TENTANG | MATERI POKOK | STATUS | | PELAK-SANAAN | DISERTAI | | UNIT/INSTANSI TERKAIT | TARGET PENYAM-PAIAN |
|----|--|--|--------|------|--------------|----------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | BARU | UBAH | | NA | Penjelasan/ Keterangan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; | Baru | | 2023 | | Penjelasan | Badan Keuangan Daerah | Oktober |
| | | b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan | | Ubah | 2023 | | Penjelasan | | Juni |
| | | a. Pertanggungjawab-an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; | Baru | | 2023 | | Penjelasan | | Maret |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 2. | AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | Rancangan yang harus disesuaikan guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung. | | | | | | | |

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

BAGUS SELO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR,


MULYONO
NIP. 19640818 199111 1002

